

KARAKTERISTIK SPASIAL PERMUKIMAN KUMUH KOTA MADYA PROVINSI SULAWESI SELATAN

Yuli Hastuti^{1*}, Akhmad Syakur²

¹Program Studi Matematika Fakultas Sains, Universitas Cokroaminoto Palopo

²Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Cokroaminoto Palopo

*E-mail: bayesian.uncp@gmail.com

ABSTRAK

Perubahan kondisi suatu kawasan menjadi permukiman kumuh muncul sebagai akibat dari ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan daya tampung lingkungan, pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil sehingga penyediaan sarana prasarana terbatas ataupun pengetahuan dan kebiasaan masyarakat yang kurang menyebabkan penurunan tingkat kualitas lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan karakteristik tingkat kekumuhan satuan wilayah desa/kelurahan kota madya Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan kondisi sarana dan prasarannya. Identifikasi kondisi permukiman kumuh sangat penting dalam menentukan kebijakan prioritas penanganan masalah permukiman kumuh baik dari sudut pandang faktor penyebab maupun berdasarkan tingkat kekumuhan.

Kata Kunci: statistika deskriptif, karakteristik spasial, permukiman kumuh

PENDAHULUAN

Perkembangan suatu kawasan menjadi kota umumnya berbanding lurus dengan timbulnya berbagai masalah sosial-ekonomi. Kota metropolitan ataupun kota pertumbuhan menuju metropolitan diidentifikasi memiliki masalah kualitas kondisi sosial-ekonomi, lingkungan serta masalah kualitas sarana dan prasana. Permasalahan tersebut mendorong terbentuknya

permukiman kumuh. Penanganan masalah permukiman kumuh dianggap cukup strategis. Keberadaan permukiman kumuh berkaitan dengan peningkatan kesenjangan sosial dan kemiskinan serta peningkatan tindak kejahatan.

Pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan untuk menangani masalah tersebut, antara lain menyusun Program Peningkatan Kualitas Permukiman (P2KP). Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi

karakteristik permukiman kumuh khususnya berdasarkan kondisi sarana dan prasarana sebagian besar rumah tangga. Informasi gambaran umum himpunan data dapat diperoleh melalui analisis statistika deskriptif. Analisis deskriptif data dimulai dari pengumpulan data, pengolahan data serta penyajian data.

TINJAUAN PUSTAKA

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan kegiatan penelitian yang berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan dan penyajian himpunan data. Statistik deskriptif ini dapat memberikan informasi mengenai karakteristik himpunan data berdasarkan variabel-variabel yang diperhatikan dalam penelitian. Penyajian data berbeda-beda sesuai dengan tipe data.

Permukiman Kumuh

Permukiman kumuh adalah daerah kawasan permukiman dengan masalah kualitas lingkungan yang cukup tinggi yang disebabkan oleh ketimpangan antara pertumbuhan penduduk yang pesat dengan pertumbuhan ekonomi yang lambat. Program P2KP bertujuan untuk mewujudkan lingkungan permukiman

di perkotaan yang layak huni melalui prakarsa 100% akses air minum, 0% kawasan permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak (100-0-100).

Panduan identifikasi kawasan kumuh yang dipublikasikan Dirjen Cipta Karya dijelaskan bahwa untuk melakukan identifikasi kawasan permukiman kumuh digunakan kriteria permukiman kumuh. Indikator permukiman kumuh berdasarkan kondisi sarana dan prasarana antara lain indikator kondisi jalan, kondisi drainase, kondisi air bersih, kondisi air limbah, dan kondisi persampahan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian menggunakan data hasil Survei Potensi Desa Tahun 2014. Sampel berupa permukiman dalam satuan wilayah desa/kelurahan kota madya di Sulawesi Selatan.

Indikator permukiman kumuh dari segi sarana dan prasana yaitu kondisi jalan, kondisi air bersih, kondisi air mandi/cuci, kondisi air limbah, dan kondisi persampahan sebagai variabel penelitian ini. Variabel-variabel tersebut dalam skala nominal.

Penentuan indeks kekumuhan menggunakan panduan identifikasi

permukiman kumuh Dirjen Cipta Karya dengan pembobotan kriteria sarana prasarana.

Makassar, Kota Parepare dan Kota Palopo. Berikut frekuensi satuan wilayah desa/kelurahan kota madya tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Provinsi Sulawesi Selatan memiliki tiga kota madya yaitu Kota

Kota Madya	Jumlah Desa/Kelurahan
Makassar	143
Palopo	48
Parepare	22

Analisis deskripsi memberikan gambaran umum kondisi prasarana dan sarana kota madya tersebut. Berikut

gambaran tingkat kekumuhan desa/kelurahan kota madya di Sulawesi Selatan.

Deskripsi kondisi jalan

	Aspal/Beton	Diperkeras (kerikil/batu/dll)	Tanah
Makassar	3 2,1%	137 95,8%	3 2,1%
Palopo	0 0,0%	47 97,9%	1 2,1%
ParePare	0 0,0%	22 100,0%	0 0,0%

Berdasarkan data PoDes 2014, 100% permukaan jalan Kota Parepare berupa aspal/beton, Sedangkan Kota

Makassar jalan aspal/beton sebanyak 95,8% dan terdapat 97,9% jalan aspal/beton di Kota Palopo.

Deskripsi kondisi saluran air limbah

	Makassar	Palopo	Parepare
Lubang serapan	10 7,0%	5 10,4%	0 0,0%
Got/selokan	128 89,5%	36 75,0%	22 100,0%
Sungai/saluran irigasi/danau/ laut	4 2,8%	1 2,1%	0 0,0%
Dalam lubang/tanah terbuka	1 0,7%	6 12,5%	0 0,0%

Berdasarkan data PoDes 2014, Seluruh desa/kelurahan di Kota Parepare telah memiliki saluran pembuangan air limbah berupa got/selokan, Sedangkan

saluran air limbah got/selokan di Kota Makassar sebanyak 89,5% dan terdapat 75% saluran air limbah di Kota Palopo berupa got/selokan

Deskripsi kondisi tempat buang sampah

	Makassar	Palopo	Parepare
Tempat sampah lalu diangkut	132 92,3%	28 58,3%	20 90,9%
Dalam lubang/dibakar	8 5,6%	17 35,4%	2 9,1%
Sungai/saluran irigasi/danau/laut	1 0,7%	0 0,0%	0 0,0%
Lainnya	2 1,4%	3 6,3%	0 0,0%

Berdasarkan data PoDes 2014, 92,3% rumah tangga di Kota Parepare yang memiliki tempat sampah, kondisi begitu pula pada 90,9% rumah tangga di Kota Makassar. Sedangkan

persentase rumah tangga dengan kondisi tempat sampah yang baik di Kota Palopo masih rendah yaitu 58,3% rumah tangga.

Deskripsi kondisi air minum

	Makassar	Palopo	Parepare
Air kemasan	52	14	2
	36,4%	29,2%	9,1%
PDAM/PAM	89	18	16
	62,2%	37,5%	72,7%
Sumur bor/pompa	2	0	3
	1,4%	0,0%	13,6%
Sumur	0	6	1
	0,0%	12,5%	4,5%
Mata air	0	10	0
	0,0%	20,8%	0,0%

Berdasarkan data PoDes 2014, sumber air minum yang paling banyak digunakan di kota madya Sulawesi Selatan adalah PDAM/PAM. Rumah

tangga yang paling banyak memanfaatkan PDAM/PAM sebagai air minum terdapat di Kota Parepare sebanyak 72,7% rumah tangga.

Deskripsi kondisi air mandi/cuci

	Makassar	Palopo	Parepare
PDAM/PAM	104	28	16
	72,7%	58,3%	72,7%
Ledeng tanpa meteran	2	0	1
	1,4%	0,0%	4,5%
Sumur bor/pompa	34	1	1
	23,8%	2,1%	4,5%
Sumur	3	8	4
	2,1%	16,7%	18,2%
Mata air	0	11	0
	0,0%	22,9%	0,0%

Berdasarkan data PoDes 2014, umumnya rumah tangga kota madya Sul-Sel menggunakan PDAM/PAM sebagai sumber air mandi/cuci. Kota dengan tingkat penggunaan PDAM/PAM sebagai sumber air mandi/cuci paling rendah adalah Kota

Palopo yaitu 58,3% sedangkan 22,9% rumah tangga kota tersebut masih menggunakan mata air.

Pembobotan indeks kekumuhan berdasarkan indikator sarana dan prasana, maka diperoleh gambaran kekumuhan desa/kelurahan kota

madya di Sulawesi Selatan sebagai berikut

	Kumuh rendah	Kumuh sedang	Kumuh tinggi
Makassar	93 65.0%	46 32.2%	4 2.8%
Palopo	20 41.7%	13 27.1%	15 31.3%
ParePare	13 59.1%	8 36.4%	1 4.5%
Total	126 59.2%	67 31.5%	20 9.4%

Pembobotan indeks kekumuhan dengan indikator kondisi sarana dan prasarana berdasarkan data PoDes 2014 diperoleh hasil 59,2% dari 213 atau sebanyak 126 desa/kelurahan kota madya di Sulawesi Selatan termasuk permukiman kumuh kategori rendah dan terdapat 31,5% merupakan perkumihan kumuh kategori sedang dan 9,4% termasuk permukiman dengan indeks kekumuhan yang tinggi. Persentase ini masih sangat tinggi dibandingkan dengan target Dirjen Cipta Marga yaitu 0% permukiman kumuh pada tahun 2020.

Persentase desa/kelurahan dengan kategori kumuh tinggi yaitu 9,4% terdiri dari 2,8% permukiman kumuh tersebut terdapat di Kota Makassar dan 4,5% berada di Kota

Parepare. Perkumihan yang sangat kumuh itu paling banyak berada di Kota Palopo sebesar 31,5%.

KESIMPULAN

Pembobotan indeks kekumuhan desa/kelurahan kota madya di Sulawesi Selatan dengan kriteria kondisi sarana dan prasarana menggunakan data Survei Potensi Desa 2014 diperoleh gambaran permukiman kumuh bahwa

1. Desa/kelurahan dengan kondisi kumuh yang masih rendah sebanyak 59,2% dan 31,5% masih dalam tahap kumuh kategori sedang. Desa/kelurahan yang termasuk permukiman yang sangat kumuh sebesar 9,4% .
2. Pola penyebaran secara wilayah dari permukiman yang sangat kumuh

yaitu 2,8% berada di Makassar, 4,5% berada di Parepare dan paling banyak berada di wilayah Palopo.

DAFTAR PUSTAKA

Direktur Jenderal Cipta Karya, 2015, *Program Peningkatan Kualitas Permukiman (P2KP) di Perkotaan*, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal, 2006, *Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh*, Dirjen Cipta Karya

Heryati, 2010, *Identifikasi dan Penanganan Kawasan Kumuh Kota Gorontalo*, Universitas